

**LAPORAN SINGKAT KOMISI I DPR RI  
(KEMENTERIAN PERTAHANAN, KEMENTERIAN LUAR NEGERI, KEMENTERIAN  
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, TENTARA NASIONAL INDONESIA, BADAN  
INTELIJEN NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA SANDI  
NEGARA, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LPP TVRI, LPP RRI, PERUM  
ANTARA, DEWAN PERS, KOMISI PENYIARAN INDONESIA, DAN KOMISI  
INFORMASI PUSAT)**

---

Tahun Sidang : 2010-2011  
Masa Persidangan : III  
Jenis Rapat : Pertemuan Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI  
Hari, Tanggal : Selasa, 26 April 2011  
Pukul : 14.00 WIB  
Sifat Rapat : Terbuka  
Pimpinan Rapat : Tubagus Hasanuddin, SE, MM  
Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP.  
Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1, Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270  
Acara : 1. Penjelasan Panglima TNI berkenaan dengan insiden Kebumen  
2. Penjelasan Menhan berkenaan dengan solusi penyelesaian insiden Kebumen  
3. Penjelasan Menhan berkenaan dengan penetapan status 'Siaga Satu'  
Hadir : 16 orang dari 50 orang Anggota Komisi I DPR RI  
Pemerintah : - Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro  
- Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono beserta jajaran

## **I. PENDAHULUAN**

Pertemuan Komisi I DPR RI dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI pada hari Selasa, tanggal 26 April 2011 dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus Hasanuddin, SE, MM dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. CATATAN :**

1. Komisi I DPR RI memahami penjelasan yang disampaikan secara terbuka oleh Menteri Pertahanan dan Panglima TNI beserta jajarannya terkait dengan permasalahan status tanah latihan TNI yang berdampak pada terjadinya insiden bentrokan Anggota TNI dengan warga yang belum lama ini di wilayah latihan TNI di Kebumen, Jawa Tengah

2. Komisi I DPR RI mendesak Pemerintah untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut :
  - a) Dalam waktu dekat menyelenggarakan pembahasan secara terpadu antara Pemerintah dengan Komisi I DPR RI, dalam hal ini Panja Aset Tanah TNI, untuk menemukan solusi konkrit (antara lain anggaran sertifikasi tanah) atas permasalahan status tanah negara yang digunakan sebagai wilayah latihan oleh TNI dan juga tanah negara yang dikelola oleh TNI
  - b) Menekankan pada penerapan proses hukum sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku bagi penyelesaian permasalahan sengketa tanah tersebut
- 3 Meningkatkan upaya kehumasan TNI untuk menghadirkan pemberitaan berdasarkan fakta dengan memanfaatkan sarana komunikasi yang ada
- 4 Komisi I DPR RI segera melakukan pembahasan internal untuk mempertimbangkan dibentuknya Tim Kecil guna mempelajari masalah yang terjadi secara mendalam sebagai bahan evaluasi ke depan.

### **III. PENUTUP**

Rapat ditutup pukul 17.40 WIB

Jakarta, 26 April 2011

**KETUA RAPAT,**

ttd

**TUBAGUS HASANUDDIN, SE, MM**  
**A-350**